

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II  
**DINAS PERIKANAN**  
KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN TAHUN 2019



Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat : Jalan Melati Nomor 14 Kandungan 71211, Telpon/Fax (0517) 21094

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Kami menyadari capaian realisasi triwulan II ini belum memuaskan karena indikator kinerja utama belum dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Perikanan selama 2 triwulan, walaupun dengan capaian kinerja triwulan 2 yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikutnya.

Demikain laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kandangan, 1 Juli 2019

**Kepala Dinas,**



**Ir. H. SAIDINOOR**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641215 199312 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .....	2
1.3. Isu Strategis .....	4
1.4. Landasan Hukum .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Perencanaan Strategis .....	7
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	10
2.3. Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2. Pengukuran .....	13
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023.....	9
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	10
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2019.....	12
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	16
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	18
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	18
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2019 .....	19
Tabel 3.2. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran.....	20
Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan II .....	21
Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya Triwulan II .....	24
Tabel 3.5. Perkembangan Kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya .....	25
Tabel 3.6. Data produksi benih ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	25
Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Tangkap Triwulan II .....	27
Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Triwulan II.....	29
Tabel 3.9. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perikanan .....	31



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perikanan sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2019 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perikanan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan pada Triwulan II dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



## 1.2. Tugas dan Fungsi SKPD

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dinas Perikanan Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Tangkap;
5. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya;



3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) UPTD.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kab. HSS terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya
  - Seksi Budidaya dan Kesehatan Ikan;
  - Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap
  - Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
  - Seksi Sarana Prasarana Penangkapan dan Pemberdayaan Nelayan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
  - Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan
  - Seksi Pemasaran dan Investasi Perikanan
6. UPTD Lingkup Dinas
  - UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan

### 1.3. Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat.

Berdasarkan data statistik tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 232.587 jiwa, sementara jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 8.490,04 ton dan jumlah perikanan budidaya sebanyak 4.106,2 ton. Potensi pengembangan budidaya air tawar dengan luasan 7.215,044 Hektar dan potensi penangkapan ikan yang sangat besar dengan luasan perairan umum sebesar 80.790 Hektar.

2. Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja belum optimal

Dari data kepegawaian di Dinas Perikanan, masih terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan fungsional umum. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas Dinas.



#### **1.4. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan laporan ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang didalam perencanaan strategis tersebut terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

#### 1). Tujuan dan sasaran

##### a. Tujuan

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB

##### b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB

#### 2). Strategi dan Kebijakan

##### a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif.

##### b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah dan disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)	
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	20,67	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Nilai/Predikat AKIP	89,02 (A)		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	80,55(A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)	
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	9,07	Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	4,29	5,46	6,56	8,64	8,9	9,07	9,07	



## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, IKU Dinas Perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	Sekretariat	Semua Bidang
		Predikat/Nilai AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, Pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%			
2	Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Dihitung berdasarkan jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun N - jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) dibagi jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) dikali 100% bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan	$\frac{\sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB tahun N} - \sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB Tahun (N-1)}} \times 100\%$	Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap	BPS Kab. HSS

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.



Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2019. Kepala Dinas Perikanan (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan, demikian juga halnya dengan para pejabat struktural eselon III (Pejabat Administrator) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Kepala Dinas Perikanan. Sedangkan untuk pejabat struktural eselon IV (Pejabat Pengawas) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan atasannya masing-masing.

Untuk para Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat dengan Sekretaris dan untuk Kepala Sub Bidang dengan Kepala Bidang nya masing-masing.

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan sebagai berikut :



Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	-	-	-	23,50	958.743.850
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	81,89 (A)	-	-	-	81,89 (A)	958.743.850
		1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	582,533,000
		1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	39.680.350
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	32.820.000
		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	14.000.000
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	24.975.000
		5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	160.450.000
		6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	310.607.650



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	278.376.750
		1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	82.520.745
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	92.456.000
		3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	103.400.000
		3). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100	%					9.750.000
		1. Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi kualitas	12	laporan	-	3	-	9	4.875.000
		2. Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	laporan	3	3	3	6	4.875.000
		4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	88.034.100
		1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	Tahun	1	-	0,5	1	-	88.034.100
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatkannya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	2.392.325.000
		1). Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.791	1.197,75	1.101,93	1.149,84	1.341,48	766.980.000



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah bibit ikan	ekor	650.000	210.500	180.000	84.500	175.000	103.150.000
		2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Jumlah luasan budidaya	Ha	0,12	-	0.8	0.4	-	178.295.000
		3. Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih ikan yang ditebar	Ekor	230.000	-	230,000.00	-	-	335.200.000
		4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	Sampel	3	1	1	-	1	14.625.000
		5. Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah petani pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi	Orang	90	30	30	30	-	25.860.000
		6. Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Jumlah benih yang ditebar	Ekor	10.000	-	10.000	-	-	118.650.000
		2). Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	9.579	2,107.38	2,490.54	2,586,33	2,395	1.580.894.000
		1. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	orang	150	-	150	-	-	19.854.000
		2. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	%	100	30	30	40	-	273.590.000
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang representatif & Jumlah alat tangkap yang representatif	unit	15 & 600	-	15 & 600	-	-	324.950.000
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah kapal yang layak operasi	unit	55	-	-	55	-	986.975.000
		3). Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	%	3	-	3	-	-	27.900.000



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menggunakan teknologi hasil perikanan	orang	9	-	9	-	-	8.250.000
		2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan	kali	1					7.750.000
		3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pemasaran hasil perikanan yang tersedia	unit	2					11.900.000
		4). Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	1	-	0,5	0,5	-	16.551.600
		1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang memiliki kompetensi	orang	70	-	35	35	-	16.551.600



Pada tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Kegiatan di Sekretariat merupakan penjabaran dari Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023, dimana indikator tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang memiliki target sebesar 23,50. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan salah satu indikator Sasarannya berupa Nilai/Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 4 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	%	100	100	100	100	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	Rp 4,875,000
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	-	-	-	81,89		Penyusunan Dokumen AKIP	Rp 4,875,000
		Tingkat Kepuasan Pelayanan	% 100 100 100 100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Rp 39,680,350				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp 32,820,000				
					Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	Rp 14,000,000				
					Penyediaan makanan dan minuman	Rp 24,975,000				
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp 160,450,000				
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Rp 310,607,650				
		% 100 100 100 100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 82,520,745					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 92,456,000					
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 103,400,000									
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 88,084,100								



Sementara untuk mencapai tujuan 2 pada Tabel 2.3 di atas yang memiliki keterkaitan dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Dinas Perikanan yang memiliki kewenangan urusan Kelautan dan Perikanan menetapkan Sasaran berupa meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor Perikanan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi yaitu Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan sampai dengan triwulan II ini masih belum dilakukan penghitungan dari target Tahun 2019 sebesar 5,46%. Sasaran ini ditopang oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bidang Perikanan Budidaya</b>										
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.197,75	1.101,93	1.149,84	1.341,48	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan bibit ikan unggul	103.150.000
									Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000
									Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000
									Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000
									Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000
<b>Bidang Perikanan Tangkap</b>										
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	2.107,38	2.490,54	2.586,33	2.395	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	19.854.000
									Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	273.590.000
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	324.950.000

Sedang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan pendukung pencapaian tujuan 2 ini., dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				I	II	III	IV			
1	Meningkatnya persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang aktif	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang aktif	%	-	3	-	-	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8,250,000
									Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7,750,000
									Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11,900,000
2	Meningkatnya persentase kapasitas petani ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	-	0,5	0,5	-	Peningkatan Kesejahteraan Petani ikan	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	16,686,600



### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan II tahun 2019.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TRIWULAN II		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5		6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	-	-	0
	Predikat/Nilai AKIP	Predikat/Nilai AKIP	82,55 (A)	-	-	0
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	5,46	-	-	0

#### 3.2 Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu



rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun hasil perhitungan pengukuran indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERHITUNGAN INDIKATOR	FORMULASI
1	2	3	4
1	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>Hasil evaluasi internal dari Inspektorat</b>	-
	Nilai/Predikat AKIP		-
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	(Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun N – Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1))/Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) x 100 %	-

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut :



Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan II

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN II (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	-	-	-	23,50	-	-			-	958.743.850	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	81,89 (A)	-	-	-	81,89 (A)	-	-			-	958.743.850	
		1). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah													
		1. Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi kualitas	12	laporan	3	3	3	3	3	3			100	4.875.000,00	1.700.000
		2. Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	laporan	6	3	3	4	5	3			100	4.875.000,00	1.750.000
		2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100			100	582,533,000	
		1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	39.680.350	15.719.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	32.820.000	11.073,683
		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	14.000.000	0
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	24.975.000	4.875.000



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN II (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	160.450.000	64.000.000
		6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	310.607.650	75.617.700
		3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100			100		
		1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	82.520.745	48.747.745,00
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	92.456.000	23.617.576,00
		3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	103.400.000	34.000.000
		4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100			100	88.084.100	629.200
		1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			100	88.084.100	629.200



Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Triwulan II ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan IV. Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 10 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Perikanan tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian yang ditarget pada triwulan IV. Penilaian yang diukur berdasarkan hasil evaluasi Laporan AKIP oleh Inspektorat.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 100% atau jumlah 15 dokumen dari target 15 dokumen pada triwulan II, dimana 9 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 6 dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah



dilaksanakan sebanyak 6 di Triwulan I dan 3 dokumen di Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jumlah	
1	Cascading Kinerja Tahun 2019	1	Dokumen
2	Renstra	1	Dokumen
3	Renja 2019 (Murni)	1	Dokumen
4	IKU + SK 2019	1	Dokumen
5	PK Murni 2019	1	Dokumen
6	Rencana Aksi 2019	1	Dokumen
7	Capaian Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2019	2	Dokumen
8	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1	dokumen
	Jumlah	9	Dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan I sebanyak 3 Dokumen, dan pada triwulan II sebanyak 3 dokumen. Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

No	Nama Dokumen	Jumlah	
1	PRA RKA Murni	1	Dokumen
2	RKA Murni	1	Dokumen
3	DPA	1	Dokumen
4	Laporan Triwulan	2	Dokumen
5	Laporan Prognosis Semesteran 1	1	Dokumen
	Jumlah	6	Dokumen

Pada indikator kinerja program kami target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.



Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya Triwulan II

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN II (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	-				0		
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.791	1.197,75	1.101,93	1.149,84	1.341,48	1.254,89	1.165,3			105,75	766.980.000	32.900.000,00
		1. Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah bibit ikan	ekor	650.000	210.500	180.000	84.500	175.000	210.500	180.000			100	103.150.000	
		2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Jumlah luasan budidaya	Ha	0,12	-	0,8	0,4	-	0	0,8			100	178.295.000	50.210.000,00
		3. Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih ikan yang ditebar	Ekor	230.000	-	230,00 0,00	-	-	0	0			0	335.200.000	0
		4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	Sampel	3	1	1	-	1	0	0			0	14.625.000	0
		5. Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah petani pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi	Orang	90	30	30	30	-	0	0			0	25.860.000	6.750.000



Pada Tabel 3.4 diatas, Pencapaian Kinerja Perikanan Budidaya yang melakukan kegiatan urusan Plihan Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi pada triwulan II diperoleh produksi perikanan budidaya sebesar 1.165,3 Ton dari target 1.101,93 Ton. Produksi pada Triwulan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan pada Triwulan II tahun 2018 yakni hanya sebesar 946,23 Ton. Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Perkembangan Kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Pengembangan bibit ikan unggul	180.000 ekor	Benih ikan yang tersedia di BBI
2	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	0,06 Ha	Budidaya ikan Nila dalam Net Tancap/Hapa dengan jumlah 20 paket dengan penerima Kelompok Madani Kapuh di Desa Kapuh Kecamatan Simpur
3	Budidaya Ikan Air Tawar	0	Belum dilaksanakan karena pindah lokasi
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0	Belum dilaksanakan
5	Pelatihan Budidaya Perikanan	0	Belum dilaksanakan

Tabel 3.6. Data produksi benih ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2018	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2020 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi*	
1	Nila	500.000	270.420	225.000	131.700	256.000
2	Lele	100.000	24.250	23.000	21.000	31.000
3	Mas	200.000	109.100	140.000	48.000	150.000
4	Patin	150.000	80.630	90.000	52.000	101.000
5	Papuyu	400.000	123.400	170.000	107.800	177.000



Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar akan dilaksanakan pada anggaran perubahan 2019 karena lokasi penerima hibah mengalami perubahan, sedangkan kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan belum dilakukan karena tidak ditemukan kasus kesehatan ikan dan perairan dan kegiatan Pelatihan Budidaya Perikanan belum dilaksanakan berhubung menyesuaikan kesiapan narasumber dari Provinsi.



Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Tangkap Triwulan II

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN II (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	-				0		
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	9.579	2,107.38	2,490.54	2,586,33	2,395	2,287,70	2,630,63			105,6	19.854.000	32.900.000,00
		1. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	orang	150	-	-	150	-	0	0			0	273.590.000	0
		2. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	%	100	30	30	40	-	30	30			100	324.950.000	108.090.000,00
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang representatif & Jumlah alat tangkap yang representatif	unit	15 & 600	-	15 & 600	-	-	0	0			0	19.854.000	0



Pada Tabel 3.7 diatas, Pencapaian Kinerja Perikanan Tangkap yang melakukan kegiatan urusan Plihan Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi pada triwulan II diperoleh produksi perikanan tangkap sebesar 2.630,63 Ton dari target 2.490,54 Ton. Produksi pada Triwulan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan pada Triwulan II tahun 2018 yakni hanya sebesar 2.463,58. Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	0	Belum dilaksanakan karena ditargetkan pada Triwulan III
2	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	30 %	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	0	Belum dilaksanakan karena pindah lokasi

Kegiatan Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap yang dilakukan diantaranya berupa patroli/razia sebanyak 3 (tiga) kali yakni bulan April di Desa Pihanin Raya Daha Selatan, bulan Mei di Desa Habirau Daha Selatan dan bulan Juni di Desa Paharangan Daha Utara. Pelaku *illegal fishing* yang tertangkap pada kegiatan razia pada bulan Mei sebanyak 2 orang yang berasal dari Desa Siang Gantung Daha Barat dan Desa Baruh Jaya Daha Selatan. Sementara pada bulan Juni ditemukan pelaku sebanyak 1 orang dari Desa Paharangan Daha Utara. Sementara kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap akan dilaksanakan pada anggaran perubahan 2019 karena lokasi penerima hibah mengalami perubahan.



Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Triwulan II

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN II (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	-				0		
		<b>Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	%	3	-	3	-	-	0	3			3	27.900.000	8.250.000
		1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menggunakan teknologi hasil perikanan	orang	9	-	9	-	-	-	9			100	8.250.000	8.250.000
		2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan	kali	1	-	-	-	1	-	-			0	7.750.000	0
		3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pemasaran hasil perikanan yang tersedia	unit	2	-	-	2	-	-	-			0	16.551.600	0
		<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan</b>	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	1	-	0,5	0,5	-	-	0,5			100	16.551.600	7.179.600
		1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang memiliki kompetensi	orang	70	-	35	35	-	-	35			100	16.551.600	7.179.600

Pada Tabel 3.8 diatas, Pencapaian Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Perikanan merupakan Bidang yang melakukan kegiatan urusan Plihan Bidang Kelautan dan Perikanan penunjang dalam mencapai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi pada triwulan II diperoleh pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif sebanyak 3 % dan peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan sebanyak 0,5 % dari kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
	<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	3%	
1	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	9 orang	Belum dilaksanakan karena ditargetkan pada Triwulan III
2	Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	0	Belum dilaksanakan karena ditargetkan pada Triwulan IV
3	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	0	Belum dilaksanakan karena ditargetkan pada Triwulan III
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan</b>	0,5	
1	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	35 orang	

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan berupa pemberian hibah telah Peti Pendingin ( Cool Box) dan Hand Sealer kepada Kelompok Ikan Kering " UP2K Sehati " dan Kelompok Muning Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan sementara kegiatan Pelatihan berupa bintek pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan di Desa Panggungan Loksado pada tanggal 27 Juni 2019.

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 3.9. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perikanan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Keuangan Triwulan II (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:				
	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor,	39.680.350,00	24.680.350,00	15.719.000,00	10,73
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.820.000,00	22.650.000,00	11.073,683,00	19,29
	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000,00	0	0,00	0
	4. Penyediaan makanan dan minuman	24.975.000,00	10.850.000,00	4.875.000,00	19,52
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran,	160.450.000,00	86.950.000,00	64.000.000,00	39,89
6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan Lapangan	310.607.650,00	251.105.000,00	75.617.700,00	24,35	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.520.745,00	51.520.745,00	48.747.745,00	59,07
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	92.456.000,00	60.656.000,00	23.617.576,00	25,54
3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.400.000,00	99.000.000,00	34.000.000,00	32,88	
3.	Program peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1. Penyusunan dokumen keuangan	4.875.000,00	2.775.000,00	1.700.000,00	34,87
2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.875.000,00	4.875.000,00	1.750.000,00	35,90	
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah				
1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100,00	11.087.100,00	629.200,00	0,71	
5	Program peningkatan produksi perikanan budidaya				
	1. Pengembangan bibit kan unggul	103.150.000,0	103.150.000,00	32.900.000,00	31,90
	2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000,00	176.120.000,00	50.210.000,00	28,16
	3. Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000,00	335.200.000,00	0	0
	4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000,00	14.625.000,00	6.750.000,00	26,10
5. Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000,00	17.440.000,00	0	0	

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Keuangan Triwulan II (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
6.	Program peningkatan produksi perikanan tangkap				
	1. Pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap	19.854.000,00	19.854.000,00	0	0
	2. Pengawasan dan kelestarian perikanan tangkap	273.590.000,00	174.990.000,00	108.090.000,00	39,51
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana nelayan perikanan tangkap	324.950.000,00	275.850.000,00	0	0
	7.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
1.	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100
	2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7.750.000,00	0	0	0
3.	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11.900.000,00	0	0	0
	8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan			
1.	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	16.551.600,00	15.551.600,00	7.179.600,00	43,38
<b>JUMLAH</b>		<b>2.278.719.445,00</b>	<b>1.780.329.795,00</b>	<b>495.109.504,00</b>	<b>21,73</b>

Nilai realisasi anggaran ini Rp. 495.109.504 atau 21,73 % lebih rendah dibanding realisasi Triwulan II Tahun 2018 yaitu 942.057.801 atau 32,31%. Hal ini terjadi karena kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap belum bisa dilaksanakan akibat perubahan lokasi.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada triwulan II tahun 2019 belum semua indikator kinerja dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat dilaksanakan di triwulan II. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja sasaran adalah :

1. Nilai/predikat AKIP belum ada. Belum dilakukan evaluasi untuk Tahun 2019. Sementara nilai evaluasi AKIP Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 80,55 atau kategori A.
2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan masih 0%. Perhitungan persentase pertumbuhan PDRB biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai 0% diperoleh karena belum dilakukan penghitungan persentase pertumbuhan PDRB.

Sementara produksi perikanan pada triwulan II sebesar 3.795,93 Ton dari target produksi perikanan triwulan II tahun 2019 yang telah ditetapkan sebesar 3.592,47 Ton.

Untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 495.109.504 atau 21,73 % lebih kecil dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2018 Rp. 942.057.801 atau 32,31%.